
ANALISIS PENGARUH BELANJA PENDIDIKAN, PDRB PER KAPITA, JUMLAH SEKOLAH DAN JUMLAH GURU TERHADAP ANGKA PARTISIPASI JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bustan Ramli¹, Khaerunnisa Aliah², Baso Iwang³, Bahrul Ulum Rusydi³, Raja Amar⁴

Email: baso.iwang@uin-alauddin.ac.id

^{1,3,4,5} Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

² Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

ABSTRACT

Education has a crucial role in the development of a nation, because the character, abilities and intelligence of a nation in the future will be greatly influenced by the education that exists today. GER, which is one of the benchmarks for educational attainment in South Sulawesi Province, has continued to decline over the last five years. These conditions are the background for this research. This research aims to determine the effect of the realization of the educational function budget per student, GRDP per capita, number of schools and number of teachers on the GER at elementary school (SD) level in South Sulawesi Province. This research uses a quantitative type of research. The data processing technique uses multiple linear regression with the help of the eviews 12 program. This model shows how much influence there is between the independent variable and the dependent variable using the OLS (Ordinary Least Square) approach. The data used is secondary data in the form of time series data for the period 2003-2022 obtained from published reports. The results of this research show that the realization of the educational function budget per student, GRDP per capita, and the number of teachers not significant effect on the GER at the elementary school (SD) level in South Sulawesi Province. Meanwhile, the number of schools has a significant effect but the relationship is negative on the GER at elementary school (SD) and equivalent levels in South Sulawesi Province.

Keywords: *Gross Enrollment Rate (GER), Realization of Education Function Budget per Student, GRDP per Capita, Number of Schools, Number of Teachers.*

ABSTRAK

Pendidikan mempunyai peranan yang krusial dalam pembangunan suatu bangsa, karena karakter, kemampuan, dan kecerdasan suatu bangsa di masa depan akan sangat dipengaruhi oleh pendidikan yang ada saat ini. APK yang merupakan salah satu tolak ukur capaian pendidikan di Provinsi Sulawesi

ARTICLE INFO

Received: 04 April 2025

Accepted: 22 April 2025

Online: 24 April 2025

*Correspondence: Baso Iwang
E-mail: baso.iwang@uin-alauddin.ac.id

Selatan terus mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Kondisi tersebut, melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh realisasi anggaran fungsi pendidikan per siswa, PDRB per kapita, jumlah sekolah dan jumlah guru terhadap APK jenjang Sekolah Dasar (SD) sederajat di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Teknik pengolahan data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program *evIEWS 12*. Model ini menunjukkan seberapa besar pengaruh yang terjadi antara variabel independent dan variabel dependent dengan pendekatan *OLS (Ordinary Least Square)*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat data *time series* dalam kurun waktu 2003-2022 yang didapatkan dari laporan yang telah dipublikasikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran fungsi pendidikan per siswa, PDRB per kapita, dan jumlah guru tidak berpengaruh signifikan terhadap APK jenjang Sekolah Dasar (SD) sederajat di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, jumlah sekolah berpengaruh signifikan namun hubungannya bersifat negatif terhadap APK jenjang Sekolah Dasar (SD) sederajat di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: Angka Partisipasi Kasar (APK), Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan per Siswa, PDRB per Kapita, Jumlah Sekolah, dan Jumlah Guru.

PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), atau dikenal juga sebagai *Sustainable Development Goals (SDGs)*, merupakan kesepakatan global yang dihasilkan oleh lebih dari 193 negara. Kesepakatan ini mencakup 17 tujuan dan 169 target yang ditargetkan untuk tercapai pada tahun 2030 (BPS, 2022). Salah satu bidang utama SDGs adalah pendidikan, dengan tujuan keempat adalah menjamin pendidikan yang berkualitas, inklusif dan adil bagi semua serta memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat pada tahun 2030. Oleh karena itu, pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia karena dapat mencapai tiga hal penting: Pertama, pendidikan membebaskan manusia dari keterbelakangan dan kebodohan. Kedua, pendidikan memungkinkan partisipasi dalam proses politik dan membantu membangun masyarakat demokratis. Ketiga, pendidikan membantu mengatasi kemiskinan (Sulistiyastuti, 2007). Salah satu indikator untuk mengukur pencapaian dalam pendidikan berkualitas adalah APK (Naharin dkk., 2023)

Menurut BPS, Angka Partisipasi Kasar (APK) diartikan sebagai perbandingan antara total penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dengan total penduduk usia sekolah yang memenuhi persyaratan pada jenjang tersebut. Sulawesi Selatan sendiri termasuk provinsi di Indonesia yang angka partisipasi kasarnya (APK) berfluktuasi. Provinsi ini telah mengalami penurunan APK tingkat sekolah dasar (SD) sederajat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Aziz (2010) beberapa faktor penyebabnya antara lain infrastruktur pendidikan yang kurang memadai dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, yang menyulitkan keluarga memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Di kalangan masyarakat miskin, pendidikan sering dianggap sebagai kebutuhan sekunder atau tersier, sehingga motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak rendah. Oleh karena itu, infrastruktur yang pas-pasan dan ketimpangan ekonomi menjadi salah satu penyebab menurunnya APK.

Tabel 1: Angka Partisipasi Kasar, Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan Per Siswa, PDRB Per Kapita, Jumlah Sekolah dan Jumlah Guru di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2022

Tahun	APK	Realisasi Anggaran Per Siswa	PDRB Per Kapita	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru
2003	101,7	33.855	1.405,00	7.881	59.113
2004	103,28	50.886	4.452,90	6.690	47.253
2005	104,42	55.908	4.862,90	6.759	51.107
2006	107,7	49.861	5.117,50	6.782	53.922
2007	110,8	71.997	5.367,60	6.736	59.912
2008	111,51	67.085	5.646,00	6.570	67.728
2009	107,54	50.271	5.940,90	6.783	75.918
2010	108,57	625.620	21.306,72	6.930	74.411
2011	101,87	798.115	22.769,19	6.929	66.218
2012	102,81	1.163.544	24.507,17	6.990	78.201
2013	108,48	1.251.373	26.083,42	7.013	72.220
2014	109,06	1.495.936	27.749,47	7.034	81.299
2015	111,34	1.805.935	29.435,92	7.035	79.853
2016	109,71	105.907	31.302,53	7.076	77.122
2017	109,64	3.872.076	33.234,11	7.126	72.747
2018	110,28	3.959.476	35.243,64	7.148	72.605
2019	108,46	4.047.562	37.474,29	7.179	76.898
2020	106,99	4.258.805	36.246,26	7.107	79.156
2021	106,85	3.041.724	37.501,45	7.125	76.494
2022	106,71	3.014.738	38.973,26	7.162	78.181

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Dan DJPK Kemenkeu 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa APK jenjang Sekolah Dasar (SD) sederajat di Provinsi Sulawesi Selatan selama 20 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Meskipun mengalami fluktuasi namun selama 20 tahun terakhir APK jenjang Sekolah Dasar (SD) sederajat di Provinsi Sulawesi Selatan selalu berada diatas 100% yang berarti selain penduduk berumur 7 sampai dengan 12 tahun yang berada pada Sekolah Dasar (SD) sederajat, terdapat penduduk yang umurnya lebih kecil dari 7 atau melebihi dari 12 tahun yang duduk tingkat pendidikan myang sama. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa capaian APK untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) sederajat di Provinsi Sulawesi Selatan terendah tercatat pada tahun 2003, yaitu 101,7%, sedangkan tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan 111,34%. Penurunan APK pada tahun 2003 disebabkan oleh rendahnya anggaran pendidikan dan keterbatasan akses masyarakat. Selain itu, pada tahun 2011, APK menurun menjadi 101,87% akibat perubahan metodologi perhitungan dan pengumpulan data. Dari tahun 2018 hingga 2022, APK juga mengalami penurunan dari 110,28% menjadi 106,71%, yang sebagian besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu proses belajar mengajar.

Belanja publik pada sektor pendidikan menjadi salah satu bentuk investasi terpenting dalam pembangunan masyarakat. Pendidikan dianggap sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup. Sesuai undang-undang, pemerintah harus mengalokasikan minimal 20 persen APBN dan APBD untuk pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menciptakan sistem dan lembaga pendidikan yang berkualitas, serta pemerataan anggaran infrastruktur dan pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat (Fakhirah, 2023). Tabel 1 menunjukkan fluktuasi realisasi anggaran pendidikan per siswa di Provinsi Sulawesi Selatan selama 20 tahun. Anggaran terendah terjadi pada tahun 2003, yakni Rp 33.855, sementara tertinggi di

tahun 2018 sebesar Rp 3.959.476. Rendahnya anggaran pada 2003 disebabkan rasio anggaran pendidikan yang masih di bawah 20% dari total APBN dan APBD. Sejak diamanatkan dalam UUD 1945, pemerintah mulai meningkatkan anggaran pendidikan secara bertahap, dengan penetapan 20% dari total belanja pada tahun 2009. Hingga 2022, rasio ini meningkat menjadi 31,52%.

Salah satu cara untuk menilai kemakmuran suatu daerah adalah PDRB per kapita, yang dihitung dari nilai tambah ekonomi dibagi total penduduk. Total penduduk memengaruhi nilai PDRB per kapita, sementara PDRB itu sendiri tergantung pada potensi SDA dan faktor produksi di wilayah tersebut (Susyanthi, 2017). PDRB per kapita berdasarkan harga konstan mencerminkan nilai ekonomi per individu. Tabel 1 menunjukkan tren peningkatan PDRB per kapita atas dasar harga konstan di Provinsi Sulawesi Selatan selama 20 tahun terakhir. Menurut BPS, PDRB per kapita terendah tercatat pada tahun 2003 sebesar Rp 1.405,00 ribu, sedangkan tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp 38.973,26. Antara 2015 dan 2019, PDRB per kapita tumbuh rata-rata 6,12% per tahun, dari Rp 29.436,00 menjadi Rp 37.351,00. Namun, selama periode yang sama, PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Selatan masih di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2020, PDRB per kapita turun menjadi Rp 36.246,26 ribu akibat pandemi Covid-19, namun meningkat lagi pada 2022 menjadi Rp 38.973,26, tumbuh 4,11% dari tahun sebelumnya. Ini menempatkan Provinsi Sulawesi Selatan di peringkat kedua dalam PDRB per kapita di region Sulawesi.

Sarana dan prasarana pendidikan memiliki peran yang krusial dalam menunjang pencapaian hasil belajar siswa, menjadikannya indikator kunci dalam standar mutu pendidikan nasional (Fidani & Prarikeslan, 2019). Peraturan Menteri menetapkan standar minimal fasilitas pendidikan untuk semua jenjang, dari PAUD sampai SMA. UU Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa lembaga pendidikan setidaknya menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung perkembangan holistik peserta didik. Dengan keberadaan sekolah yang memadai, angka partisipasi pendidikan dapat meningkat, mendorong masyarakat untuk melanjutkan pendidikan dan berkontribusi pada peningkatan partisipasi pendidikan secara keseluruhan. Tabel 1 menunjukkan fluktuasi jumlah Sekolah Dasar (SD) sederajat di Provinsi Sulawesi Selatan selama 20 tahun terakhir. Menurut BPS, jumlah terendah tercatat pada tahun 2008 dengan 6.570 sekolah, sedangkan tertinggi pada tahun 2003 dengan 7.881 sekolah. Penurunan pada 2008 disebabkan oleh total sekolah SD yang mencapai 5.987, ditambah 583 sekolah MI. Sebaliknya, jumlah tertinggi pada 2003 didorong oleh 7.268 sekolah SD dan 613 sekolah MI.

Menurut UU No. 14 Tahun 2005, "guru adalah pendidik profesional yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, melatih, serta menilai peserta didik". Guru memegang peranan penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan efisien. Sebagai ujung tombak pendidikan, peran guru sangat krusial dalam keberhasilan bidang pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan untuk memantau dan mengevaluasi pemerataan serta kecukupan tenaga pendidik, baik dari segi kualitas serta kuantitas (Wiharna dkk., 2010). Tabel 1 menunjukkan fluktuasi jumlah guru Sekolah Dasar (SD) sederajat di Provinsi Sulawesi Selatan selama 20 tahun. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah terendah tercatat pada tahun 2004 dengan 47.253 guru, sedangkan tertinggi pada tahun 2014 dengan 81.299 guru. Penurunan pada 2004 disebabkan oleh jumlah guru SD dan MI yang mencapai titik terendah, yaitu 44.477 guru SD dan 2.776 guru MI. Sebaliknya, jumlah tertinggi pada 2014 didorong oleh 73.330 guru SD dan 7.769 guru MI.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapatnya masalah penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) melatarbelakangi penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, PDRB Per Kapita, Jumlah Sekolah dan Jumlah Guru Terhadap Angka Partisipasi Jenjang Pendidikan Dasar di Provinsi Sulawesi Selatan”

TINJAUAN TEORITIK

Angka Partisipasi Kasar

Pemerintah mengukur keberhasilan program pendidikan salah satunya dengan melihat sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses belajar-mengajar. APK menjadi salah satu tolak ukur umum yang dipergunakan untuk mengetahui tingkat keikutsertaan penduduk pada pendidikan. Dengan kata lain APK menunjukkan seberapa banyak anak usia sekolah yang mbenar-benar mengikuti pendidikan formal (Marlina, 2014). Oleh karena itu, Baik negara maju maupun berkembang, pendidikan selalu menjadi prioritas untuk mengembangkan SDM. Karena SDM merupakan faktor kunci pendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan suatu negara.

Menurut Becker (1992), keberhasilan ekonomi baik pada tingkat individu maupun secara keseluruhan dipengaruhi oleh seberapa baik seseorang menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk pengembangan diri. Teknologi juga berperan sebagai penggerak utama dalam ekonomi modern, khususnya di sektor teknologi tinggi, di mana modal manusia berfungsi sebagai sumber daya utama. Beberapa ahli mendefinisikan modal manusia sebagai kombinasi pengetahuan, ide, informasi, kesehatan, serta keterampilan yang dimiliki oleh individu (Rutfiana & Hayati, 2020).

Sejalan dengan pendapat tersebut, Schultz (1961) mengemukakan bahwasanya investasi dalam SDM berguna meningkatkan keahlian dan produktivitas individu, serta merupakan langkah penting untuk mengatasi perbudakan. Dengan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), individu akan memiliki banyak pilihan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Salah satu cara untuk meningkatkan kapabilitas tenaga kerja yang diidentifikasi oleh Schultz adalah melalui pendidikan formal yang dibarengi dengan peningkatan keterampilan (Subroto, 2014).

Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan Persiswa

Anggaran pendidikan merupakan rencana keuangan yang disiapkan oleh pemerintah guna memuat berbagai program dan kegiatan Pendidikan. Pemerintah sangat menekankan pentingnya pendidikan sebagai bagian utama dalam mendukung pembangunan nasional. Ini tercermin dari alokasi anggaran yang signifikan untuk pendidikan. Ketentuan ini dimuat pada UU No 20 Tahun 2003 terkait Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49, yang menyatakan “dana pendidikan, di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan dinas, harus dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD”. Secara garis besar belanja pemerintah dapat diartikan sebagai rencana fiskal yang mencerminkan pilihan kebijakan pada periode yang akan datang (Febrianti, 2023).

Menurut Maarif (2020), pengeluaran Pemerintah Indonesia pada umumnya terbagi dalam dua kategori, yaitu biaya pembangunan dan biaya rutin. Biaya pembangunan meliputi belanja investasi negara, termasuk investasi di bidang pendidikan dan kesehatan (masyarakat). Sedangkan belanja konvensional adalah biaya yang diterima pemerintah setiap tahunnya untuk menunjang pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan negara. Wossman & Hanushek (2007) dalam Afridzal dkk (2018) berargumen bahwa alokasi anggaran bidang pendidikan adalah faktor krusial dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu teori yang digunakan penelitian ini terkait pengeluaran pemerintah adalah teori Pembangunan tentang Pengeluaran Pemerintah peacock & wisemen. Sir Alan Turner Peacock dan Jack Wisemen (1961) merupakan seorang ekonom yang mengutarakan sebuah teori tentang pertumbuhan pengeluaran pemerintah. Teori Peacock dan Wisemen berfokus pada analisis pendapatan dan belanja pemerintah. Dalam analisisnya pemerintah berupaya menaikkan belanja dengan peningkatan penerimaan pajak. Ketika penerimaan pajak meningkat maka belanja pemerintah pun cenderung meningkat. Namun, penduduk umumnya tidak menyukai beban pajak yang tinggi untuk menutupi peningkatan belanja pemerintah (Anantika & Sasana, 2020).

Peacock dan Wisemen berpendapat bahwa masyarakat mempunyai batas toleransi pajak, yaitu tingkat dimana mereka akan menerima jumlah pajak yang diperlukan untuk mendukung pengeluaran pemerintah. Namun, batas tersebutlah yang menjadi kendala pemerintah untuk meningkatkan pungutan pajak secara sembarangan.

PDRB per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto merupakan tolak ukur yang umumnya dipakai dalam menilai tingkat kesuksesan pembangunan perekonomian suatu daerah atau wilayah. PDRB per kapita mengacu pada rasio antara total GDP dan jumlah penduduk daerah tertentu. PDRB per kapita berfungsi sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan karena lebih mencerminkan nilai tambah yang diciptakan oleh setiap orang di suatu wilayah (Ariansyah, 2017). Hal tersebut senada dengan pernyataan susanti (1995) dalam Susyanthi (2017) bahwa PDRB per kapita termasuk indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat pada tingkat makro. PDRB per kapita yang tinggi mencerminkan kesehatan perekonomian suatu masyarakat yang lebih baik, sedangkan PDRB per kapita yang rendah menunjukkan keterbelakangan perekonomian. Pendapatan yang diperoleh individu dapat diatribusikan pada pengeluaran pendidikan. Ketika PDRB per kapita meningkat, maka kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan juga meningkat.

Todaro (2006) dalam (Rutfiana & Hayati, 2020) Mengatakan bahwa Tingkat pendidikan yang diperoleh seseorang dapat dipandang sebagai hasil dari kombinasi antara kekuatan permintaan dan penawaran, mirip dengan mekanisme yang terjadi pada barang dan jasa ekonomi lainnya. Dalam teori permintaan pendidikan yang dikembangkan oleh Mark Blaug, Psacharopoulos, dan woodhall mengatakan bahwa, minat masyarakat untuk bersekolah (permintaan pendidikan) dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial ekonomi utama seperti: Pertama, Semakin tinggi tingkat PDRB per kapita masyarakat, mengakibatkan semakin besar permintaan terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Orang tua mampu menanggung biaya pendidikan anak lebih lama. Kedua, Semakin tinggi tingkat pengembalian investasi pendidikan seperti tingkat kesempatan kerja dan gaji yang lebih baik bagi lulusan perguruan tinggi, maka akan semakin meningkatkan permintaan terhadap pendidikan. Ketiga, Ketersediaan sarana prasarana pendidikan seperti ketersediaan sekolah, laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga serta kualitas pengajar akan mempengaruhi minat melanjutkan Pendidikan.

Hector Corea dalam Aziz (2010) mengemukakan hal yang sama bahwasanya Permintaan pendidikan adalah istilah yang merujuk pada kebutuhan untuk mendapatkan pelajaran tertentu. Pendidikan dapat dipengaruhi oleh budaya, ekonomi, dan politik. Selanjutnya, sejumlah faktor, termasuk pendidikan, pendapatan, pekerjaan orang tua, biaya pendidikan, keputusan pemerintah dan lembaga, serta pandangan individu tentang pendidikan individu,

memengaruhi permintaan pendidikan individu secara keseluruhan. Selain itu, permintaan pendidikan tergantung pada cara orang melihatnya: apakah dianggap sebagai investasi, konsumsi, ataukah keduanya.

Jumlah Sekolah

Menurut UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Sekolah merupakan istilah yang digunakan di bidang pendidikan. Sekolah adalah tempat di mana pembelajaran dan pengajaran dilakukan secara terorganisir dalam jenjang dan waktu tertentu. Jenis sekolah sebagai lembaga pendidikan bermacam-macam, dan ditinjau dari fungsinya dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu sekolah swasta dan juga negeri. Sekolah negeri adalah sekolah yang dikelola oleh pemerintah dari segi fasilitas, keuangan, dan sumber daya manusia, sedangkan sekolah swasta adalah sekolah yang dikelola oleh non-pemerintah, yakni lembaga swasta.

Todaro (2006) dalam Rutfiana & Hayati (2020) menyatakan bahwa pendidikan sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan menjamin kemajuan ekonomi dan sosial. Kualitas pendidikan seseorang sebanding dengan perkembangan ekonomi suatu negara dan sebaliknya. Pendidikan yang diterima seseorang dapat diibaratkan seperti barang atau jasa lainnya yang keberadaannya ditentukan oleh kombinasi kekuatan penawaran dan permintaan. Pasar pendidikan melibatkan keseluruhan permintaan dan penawaran jenis pendidikan tertentu. Setidaknya ada dua faktor kunci di sini yakni permintaan serta penawaran pendidikan (Aziz, 2010).

Penyediaan pendidikan itu sendiri dapat dipertimbangkan baik pada tingkat makro maupun mikro. Pada tingkat makro, penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dengan pendekatan ketenagakerjaan. Pada tingkat mikro pendidikan dilakukan pada jenjang pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Oleh karena itu, pendidikan yang disediakan oleh banyak sekolah, seperti sekolah dasar, pendidikan menengah, dan universitas diperlukan bagi masyarakat sekitar. Sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah biasanya disebabkan oleh tekanan politik, baik dari parlemen maupun dari pihak lain. Dengan kata lain, tingkat penawaran atau penyediaan sekolah oleh negara juga dibatasi oleh tingkat belanja pemerintah untuk pendidikan (Aziz, 2010).

Jumlah Guru

Pengertian guru dimuat dalam UU No14 Tahun 2005 pasal 1 yang menyatakan bahwasanya “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Dari pengertian tersebut bisa dikatakan bahwa Seorang guru adalah manusia dewasa yang mengambil tanggung jawab sadar untuk mengajar, belajar dan membimbing siswa.

Salah satu teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori sinyal (*signaling theory*). Teori *signaling* yang diperkenalkan oleh Spence (1973) erat kaitannya dengan pendidikan dan pertama kali diperkenalkan dalam studinya yang bertajuk “*Job Market Signaling*”. Spence menyatakan bahwa sinyal memberikan sinyal kepada pihak lain, dimana pengirim berusaha menyampaikan informasi yang relevan agar dapat digunakan oleh penerima. Penerima menyesuaikan tindakannya berdasarkan pengetahuannya terhadap sinyal yang diterima. Teori ini muncul dari asimetri informasi, dimana satu pihak mempunyai informasi lebih banyak dibandingkan pihak lainnya (Fahmi dkk., 2015). Teori sinyal ini pada intinya menjelaskan tentang bagaimana pihak-pihak yang memiliki informasi asimetris berkomunikasi dan

berinteraksi. Jika kita lihat dalam konteks pendidikan, teori ini berfokus pada bagaimana sekolah dan pemerintah menyampaikan informasi tentang kualitas pendidikan kepada orang tua, karena sekolah dan pemerintah memiliki informasi yang lebih banyak tentang kualitas pendidikan dibandingkan orang tua. Oleh sebab itu, jumlah guru disekolah dapat menjadi sinyal kualitas pendidikan bagi orang tua. Ketika jumlah guru memadai, orang tua mungkin berasumsi bahwa sekolah memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan pendidikan berkualitas yang mempersiapkan anak-anak mereka untuk kesempatan kerja yang lebih banyak dimasa depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metode kuantitatif, dan dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun data yang dipergunakan adalah data sekunder berbentuk *time series* (runtut waktu) dalam kurun waktu 20 tahun dimulai dari tahun 2003-2022. Data diperoleh dari berbagai artikel dan publikasi instansi-instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPk KEMENKEU). Teknik analisis yang dipergunakan ialah analisis regresi linear berganda yang dikelola melalui *evIEWS 12*. Adapun model persamaan dalam penelitian dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 - \beta_1X_1 + \beta_2X_2 - \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Interpresentasinya yaitu β_0 adalah konstanta, Y adalah APK, X1 adalah realisasi anggaran fungsi pendidikan per siswa, X2 adalah PDRB per kapita, X3 adalah jumlah sekolah, X4 adalah jumlah guru dan e adalah *Error term*.

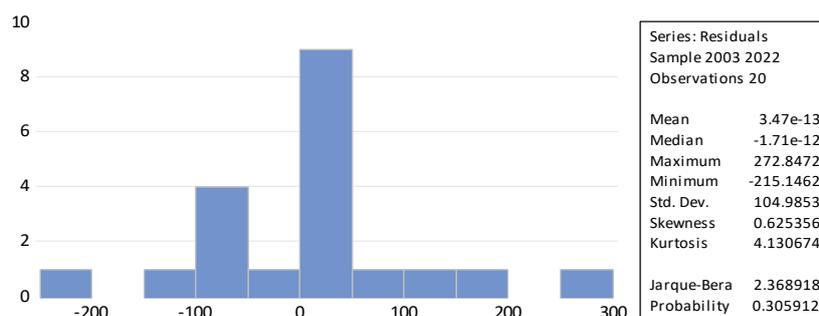
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis data

Uji Normalitas

Tes normalitas data berguna untuk menentukan mungkinkah data pada model regresi terdistribusi normal. Pengujian dilakukan menggunakan Jarque-Bera. Data dianggap normal jika besaran signifikansi di atas 0,05; sebaliknya, jika di bawah 0,05, data dianggap tidak normal.

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data diolah *EvIEWS12*, 2025

Berdasarkan Gambar 1, hasil pengujian normalitas memperlihatkan nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar $0,305912 > 0,05$. Sehingga data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk memeriksa keterkaitan antara variabel independen dalam model regresi. Adanya korelasi antar variabel menunjukkan masalah multikolinearitas, yang menyulitkan analisis pengaruh variabel. Tes ini dilakukan menggunakan metode Variance Inflation Factor; nilai VIF di atas 10 mengindikasikan masalah multikolinearitas, sedangkan nilai di bawah 10 menunjukkan tidak ada masalah.

Tabel 2: Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	Batas VIF
X1	3.542.634	<10
X2	6.156.734	<10
X3	1.147.819	<10
X4	2.756.419	<10

Sumber: *Data diolah Eviews12, 2025*

Berdasarkan Tabel 2, variabel penelitian (realisasi anggaran pendidikan per siswa, PDRB per kapita, jumlah sekolah, dan jumlah guru) memiliki nilai VIF < 10, sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Tes autokorelasi dimaksudkan untuk mendeteksi hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t dan $t-1$ pada model. Model regresi dianggap layak jika tidak terdapat autokorelasi. Penelitian ini menggunakan uji Breusch-Godfrey, di mana signifikansi $> 0,05$ menunjukkan tidak ada autokorelasi, sedangkan signifikansi $< 0,05$ menandakan adanya autokorelasi.

Tabel 3: Hasil Uji Autokorelasi

Prob. Chi-Square	Batas Prob. Chi-Square
0.3229	>0.05

Sumber: *Data diolah Eviews12, 2024*

Dari Tabel 3, pengujian autokorelasi memperlihatkan nilai signifikansi Probabilitas Chi-Square sebesar $0,3229 > 0,05$. Sehingga tidak terdapat autokorelasi dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Tes heteroskedastisitas bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan residual antara observasi dalam model regresi. Uji yang digunakan adalah white test, dengan membandingkan nilai probabilitas Chi-Square; jika probabilitas $> 5\%$, maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

Tabel 4: Hasil Uji Heteroskedastisitas

Prob. Chi-Square	Batas Prob. Chi-Square
0.1689	>0.05

Sumber: Data diolah Eviews12, 2025

Dari Tabel 4, hasil uji heteroskedastisitas memperlihatkan nilai Probabilitas Chi-Square sebesar $0,1689 > 0,05$. Dengan demikian, tidak terdapat heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa baik metode yang digunakan menjelaskan variabel penelitian. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1; $R^2 = 1$ menunjukkan prediksi sempurna, sementara $R^2 = 0$ berarti variabel independen tidak memengaruhi variabel dependen.

Tabel 5: Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	Adjusted R-squared
0.532403	0.407710

Sumber: Data diolah Eviews12, 2025

Hasil uji koefisien determinasi memperlihatkan nilai R^2 sebesar 0,532403, yang berarti 53% variasi APK dapat dijelaskan oleh empat variabel independen: realisasi anggaran pendidikan per siswa, PDRB per kapita, jumlah sekolah, dan jumlah guru. Sisa 47% dijelaskan oleh faktor di luar model ini.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F dipergunakan untuk memutuskan dampak keseluruhan variabel independent terhadap variabel dependent. Tes dilakukan dengan membandingkan nilai prob-F statistik dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$. Jika tingkat kesalahan variabel $> 0,05$, maka variabel independent tidak berdampak signifikan terhadap variabel dependent, dan sebaliknya.

Tabel 6: Hasil Uji F

F-statistik	Prob. F-statistik
4.269.724	0.016688

Sumber: Data diolah Eviews12, 2025

Berdasarkan tabel 6, besaran probabilitas F-statistik sebesar $0,016688 < 0,05$ menunjukkan bahwasanya variabel independen realisasi anggaran pendidikan per siswa, PDRB per kapita, jumlah sekolah, dan jumlah guru secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK).

Uji Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk menentukan dampak signifikan masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent. Tes dilakukan dengan membandingkan nilai prob-t statistik

dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$. Jika tingkat kesalahan suatu variabel $> 0,05$, artinya variabel tersebut tidak signifikan, dan sebaliknya.

Tabel 7: Hasil Uji T

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-statistik	Prob.
C	39316.74	17621.76	2.231147	0.0414
X1	-0.000413	0.000750	-0.551026	0.5897
X2	0.181045	0.113493	1.595214	0.1315
X3	-5.487920	2.460641	-2.230280	0.0414
X4	0.072908	0.100893	0.722631	0.4810

Sumber: Data diolah Eviews12, 2024

Berdasarkan tabel 7, diketahui bahwa Variabel realisasi anggaran fungsi pendidikan per siswa (X1) memiliki nilai prob-t statistik sebesar $0,5897 > 0,05$, yang menjelaskan bahwa variabel ini tidak berdampak signifikan terhadap APK jenjang Sekolah Dasar (SD) sederajat. Dengan demikian, hipotesis penelitian ditolak, H1 ditolak, dan H0 diterima. Variabel PDRB per kapita (X2) memiliki nilai prob-t statistik sebesar $0,1315 > 0,05$, yang menjelaskan bahwa variabel ini tidak berdampak signifikan terhadap APK Sekolah Dasar (SD) sederajat. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ditolak, H1 ditolak, dan H0 diterima. Variabel jumlah sekolah (X3) memiliki nilai prob-t statistik sebesar $0,0414 < 0,05$, yang menjelaskan bahwa variabel ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap APK Sekolah Dasar (SD) sederajat. Dengan demikian, hipotesis penelitian ditolak, H1 ditolak, dan H0 diterima. Variabel jumlah guru (X4) memiliki nilai prob-t statistik sebesar $0,4810 > 0,05$, yang menjelaskan bahwa variabel ini tidak berdampak signifikan terhadap APK Sekolah Dasar (SD) sederajat. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ditolak, H1 ditolak, dan H0 diterima.

2. Pembahasan

Pengaruh Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan Per Siswa Terhadap APK

Analisis hasil regresi memperlihatkan bahwasanya variabel realisasi anggaran fungsi pendidikan per siswa tidak berdampak signifikan terhadap APK pada tingkat sekolah dasar (SD), dengan nilai signifikansi sebesar $0,5897 > 0,05$ dan koefisien sebesar $-0,000413$. Temuan ini sejalan dengan penelitian Maharani (2020) yang menemukan adanya dampak negatif dan tidak signifikan antara anggaran pendidikan terhadap partisipasi pendidikan. Studi Fakhira (2018) juga membenarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan tidak berdampak signifikan terhadap angka partisipasi sekolah. Fakhira (2023) menambahkan belanja pemerintah pada sektor pendidikan mempunyai dampak negatif dan tidak signifikan terhadap APK di Sulawesi Selatan.

Di sisi lain, temuan oleh Afifah & Sopiany (2017), Aurellin & Sentosa (2023), Dahiri (2023), dan Linawati (2016) menunjukkan hasil berbeda, dengan menyatakan bahwa belanja pemerintah di bidang pendidikan berdampak positif dan signifikan terhadap APK.

Pengaruh PDRB per Kapita Terhadap APK

Analisis hasil regresi memperlihatkan bahwasanya variabel PDRB per kapita tidak berdampak signifikan terhadap APK jenjang Sekolah Dasar (SD) sederajat, dengan nilai signifikan $0,1315 > 0,05$ dan koefisien $0,181045$. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang dilakukan Marisa dkk (2023), Faizah dkk (2023), Budiratna & Qibthiyyah (2020), Rutfiana & Hayati (2020) dan Habibah dkk (2019) yang menyatakan bahwa PDRB per kapita tidak berpengaruh

signifikan terhadap APK. Namun, penelitian oleh Susyanthi (2017), Adhierianto (2014), dan Ramadhan (2013) menunjukkan hasil berbeda, menyatakan bahwa PDRB per kapita berdampak signifikan terhadap APK.

Pengaruh Jumlah Sekolah Terhadap APK

Hasil analisis regresi memperlihatkan bahwa variabel jumlah sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap APK jenjang Sekolah Dasar (SD) sederajat dengan nilai signifikan sebesar $0.0414 < 0.05$ dan nilai koefisien sebesar -5.487920 . Hasil penelitian ini selaras dengan Rahmatin & Soejoto (2017), yang menemukan pengaruh signifikan jumlah sekolah terhadap partisipasi pendidikan, meskipun hubungan tersebut negative peningkatan jumlah sekolah justru menurunkan partisipasi. Sebaliknya, penelitian oleh Mukhaiyar dkk. (2022) dan Pudyastuti & Mulyaningsih (2021) menunjukkan bahwa jumlah sekolah berpengaruh positif terhadap angka partisipasi kasar. Kesimpulannya, penambahan jumlah sekolah meningkatkan APK, sementara pengurangan jumlah sekolah menurunkannya.

Pengaruh Jumlah Guru Terhadap APK

Analisis hasil regresi menunjukkan bahwasanya variabel jumlah guru tidak berdampak signifikan terhadap APK jenjang Sekolah Dasar (SD) sederajat dengan nilai signifikan sebesar $0.4810 > 0.05$ dan nilai koefisien sebesar 0.072908 . Hasil penelitian ini selaras dengan Fakhirah (2023), Solechah (2010), Yanti dkk. (2023), dan Marisa dkk. (2023), yang menyatakan bahwa jumlah guru tidak berdampak signifikan terhadap partisipasi pendidikan. Sebaliknya, temuan Elfarabi (2018) dan Ramadanisa & Triwahyuningtyas (2022) menemukan bahwa tenaga pendidik berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi pendidikan. Artinya, peningkatan jumlah guru akan diikuti oleh peningkatan angka partisipasi kasar.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran pendidikan per siswa, PDRB per kapita, dan jumlah guru tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Sekolah Dasar di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebaliknya, jumlah sekolah justru memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap APK. Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan agar dana dapat digunakan secara efektif dan efisien. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB per kapita perlu diiringi dengan distribusi yang merata agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk akses terhadap pendidikan berkualitas. Ketiga, kebijakan pemerataan pendidikan tidak hanya berfokus pada jumlah sekolah, tetapi juga pada kualitas sekolah, distribusi guru, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Terakhir, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kompetensi guru melalui berbagai program pelatihan dan insentif untuk meningkatkan mutu pendidikan dan partisipasi siswa.

REFERENSI

- Afridzal, A., Abdullah, S., Saputra, M., & ... (2018). Anggaran Pendidikan, Kepatuhan terhadap Regulasi, dan Intervensi: Sebuah Telaah Literatur. *Jurnal Penelitian Ekonomi ...*, 2(1), 32–39.
- Aziz, A. (2010). Pengaruh Program Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Apk Wajar: 2006-2008. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 14(1), 53–100.
- BPS. (2022). *Indikator 2022*.
- Fakhirah, N. (2023). Analisis Determinan Angka Partisipasi Kasar (APK) Melalui Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Fidani, W. L., & Prarikeslan, W. (2019). Analisis Kebutuhan Dan Sebaran Fasilitas Pendidikan Tingkat Smp Dan Sma Di Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Buana*, 3(6), 1152.
- Fahmi, M., & Mulyono, Y. O. (2015). Pendidikan, Human Capital atukah Signaling? Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 15(2), 113–120.
- Febrianti. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi pada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera Tahun 2010-2020. In *repository.unpas.ac.id*.
- Maarif, M. R. (2020). Analisis Pengaruh Kriminalitas, Anggaran Pendidikan, Dan Kepadatan Penduduk Terhadap Kemiskinan Di 9 Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2018 Skripsi Diajukan. In *Feb, UIN Syarif Hidayatullah* (Vol. 5, Issue 3).
- Marlina. (2014). Surat pencatatan ciptaati. *Repository.Uin-Suska.Ac.Id*, 23.
- Naharin, S. N., Robby, R. R., & Akbarita, R. (2023). Model Faktor Yang Memengaruhi Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar di Jawa Timur Menggunakan Regresi Data Panel. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 8(2), 441.
- Sulistyastuti, D. R. (2007). Pembangunan Pendidikan Dan Mdgs Di Indonesia Sebuah Refleksi Kritis. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 11(2), 19–44.
- Susyanthi, R. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Pdrb Per Kapita Terhadap Angka Partisipasi Kasar Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (Sma) Sederajat Di Kabupaten Lampung Timur. In *digilib.unila.ac.id*.
- Subroto, G. (2014). Hubungan Pendidikan Dan Ekonomi : Perspektif Teori Dan Empiris Education And Economics : Perspectives of Theoretical and Empirical. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 6(3), 390–400.